



Jangan Golput

JOGJA-Pemilih di Kota Jogja dan Kulonprogo diminta menggunakan hak pilih mereka dalam pilkada 2017, Rabu (15/2) besok. Mereka juga diimbau berhati-hati dengan bujuk rayu berupa politik uang.

Ujang Hasanudin, Sunartono, & Rima Sekarani I. N.
redaksi@harianjogja.com

- ▶ Ada 52 TPS di Kota Jogja dan 97 TPS di Kulonprogo yang rawan politik uang.
- ▶ HB X meminta perusahaan memberi kesempatan kepada karyawan mereka untuk mencoblos dalam pilkada.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengimbau warga yang sudah tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) mendatangi bilik suara dan mencoblos salah satu pasangan calon kepala daerah. "Saya harapkan masyarakat Kota [Jogja] maupun Kulonprogo menggunakan hak pilih mereka, karena bagaimanapun kepemimpinan lima tahun ini ikut menentukan perjalanan Kota [Jogja] maupun Kulonprogo. Silahkan menentukan pilihannya dengan baik, jangan golput. Harapan saya masa depan lima tahun yang akan datang bisa memberikan nuansa yang lebih baik daripada tahun sebelumnya," kata dia Kraton Kilen, Senin (13/2) pagi.

Kemarin, Sultan menerima C6 atau undangan untuk mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9 di Magangan, Kraton. HB X mengatakan jelang pilkada, masyarakat lebih tertib dan tenang, baik di Kota Jogja maupun Kulonprogo. Tidak ada kampanye dengan mobilisasi massa besar-besaran. Pada hari pemungutan suara, pemerintah telah menetapkan libur nasional. Sultan meminta pemilik pusat perbelanjaan, pertokoan hingga industri memberikan kesempatan kepada pekerja agar menggunakan hak pilih.

"Tidak harus dengan meliburkan karyawan, tetapi berilah kesempatan kepada karyawan untuk bisa menggunakan hak pilih, entah pagi atau siang hari," ujar dia.

● Lebih Lengkap Halaman 8

☐ Netral ☐ Biasa ☐ Jump

Jangan...

Di luar anjuran yang dilontarkan HB X, masyarakat diminta waspada dengan praktik politik uang yang rawan terjadi menjelang pemungutan suara.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Hifdzil Alim, mengatakan politik uang tidak hanya berupa pemberian selebar atau segepok duit.

"Tetapi juga bisa dalam bentuk pemberian barang, janji, dan iming-iming fasilitas lainnya. Di detik-detik menjelang pemungutan suara akan semakin rawan. Dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk berani menolak dan melapor kepada aparat jika menemukan politik uang," kata dia melalui sambungan telepon.

Menurut dia, praktik luncur itu dalam jangka pendek bisa merusak kualitas demokrasi. Masyarakat seharusnya memilih calon pemimpin berdasarkan visi misi, sepak terjang calon, dan perencanaan pembangunan daerah.

"Bukan karena iming-iming uang maupun barang," ucap dia. Dalam jangka panjang, lanjutnya, kepala daerah yang terpilih karena politik uang, bisa merugikan masyarakat karena berpotensi korupsi dengan cara mengeruk kekayaan daerah untuk menutupi biaya politik yang dikeluarkan saat pencalonan.

Potensi politik uang di pilkada 2017 cukup besar. Berdasarkan catatan Badan Pengawas Pemilu, ada 10,3% TPS rawan politik uang di Kulonprogo dan 6,5% di Kota Jogja. Dari 937 TPS di Kulonprogo, 97 ditengarai rawan politik uang. Adapun di Kota Jogja, dari 794 TPS, 52 di antaranya disinyalir berpotensi memunculkan politik uang. Secara keseluruhan, ada 686 TPS di Kota Jogja dan 235 di Kulonprogo yang rawan pelanggaran. Ancaman gangguan itu meliputi akurasi data pemilihan, ketersediaan logistik, pemberian uang maupun barang, keterlibatan penyelenggara

pemilu, dan kepatuhan tata cara pemungutan serta penghitungan suara.

"Semua pengawas pilkada Jogja dan Kulonprogo diminta fokus TPS-TPS rawan," ujar Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad Najib.

Sementara itu, Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kota Jogja mencatat lebih banyak TPS rawan politik uang, terutama di wilayah pinggiran dengan tingkat kesejahteraan kurang. Panwas Kota Jogja menandai 66 TPS rawan politik uang, lebih banyak daripada catatan Badan Pengawas Pemilu yang hanya 52 TPS. Rinciannya lima TPS di Tegalrejo, lima TPS di Gondokusuman, 8 TPS di Danurejan, 6 TPS di Gedongtengen, 11 TPS di Wirobrajan, 11 TPS di Mantrijeron, 10 TPS di Kraton, delapan TPS di Umbulharjo, dan Pakualaman dan Mergansan, masing-masing satu TPS.

"Berdasarkan pengalaman, pemilihan di wilayah-wilayah yang tingkat kesejahteraannya kurang akan cenderung membuka diri pada politik transaksional," kata Anggota Panwas Kota Jogja Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Iwan Ferdian, sesuai menghadiri pelepasan logistik di Gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja, Senin (13/2).

Iwan mengatakan politik uang semakin rawan jelang hari pemungutan suara, dengan berbagai modus, mulai dari undangan pertemuan warga hingga mobilisasi massa. Pilkada Kota Jogja akan diikuti pasangan Imam Priyono dan Achmad Fadli serta Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi.

Distribusi Logistik

Sementara itu, logistik pemungutan dan penghitungan suara siap didistribusikan ke setiap TPS penyelenggara Pilkada Kulonprogo pada Selasa (14/2) ini. Proses tersebut akan dilakukan dalam

dua gelombang.

Pejabat Divisi Umum Keuangan dan Logistik KPU Kulonprogo, Budi Priyana mengatakan setiap gelombang menasar enam kecamatan. "Enam kecamatan di wilayah utara masuk pendistribusian pagi, sedangkan enam kecamatan di wilayah selatan sebagian siang," ujar Budi, Senin (13/2).

Budi memaparkan, pada pagi hari, logistik didistribusikan ke Kecamatan Kalibawang, Samigaluh, Nanggulan, Girimulyo, Kokap, dan Pengasih. Total TPS yang dituju mencapai 452 titik. Sesuai skenario awal, wilayah perbukitan Menoreh memang mendapatkan prioritas dalam urutan distribusi. Hal itu mempertimbangkan kondisi geografis yang dinilai lebih sulit dijangkau, baik karena jauhnya jarak maupun jalan yang menanjak.

Pada siang, logistik dikirim ke 485 TPS yang tersebar di enam kecamatan lain, yakni Kecamatan Sentolo, Lendah, Galur, Panjatan, Wates, dan Temon. "Logistik yang akan didistribusikan meliputi satu kotak suara dan dua bilik suara untuk setiap TPS, kotak suara tambahan untuk 29 TPS pengampu, dan tiga kotak suara kosong per kecamatan untuk rekapitulasi tingkat PPK," kata Budi menguraikan.

Proses pengepakan logistik Pilkada 2017 sebelumnya telah rampung pada Selasa (7/2) pekan lalu. Seluruh logistik saat ini masih disimpan di Gudang Pemkab Kulonprogo.

Kapolres Kulonprogo, AKBP Nanang Djunaedi menyatakan siap mendukung pengamanan pendistribusian logistik Pilkada 2017. Puluhan personel khusus disiagakan untuk mengawal tim distribusi logistik yang diberangkatkan dari Gudang Pemkab Kulonprogo.

Pilkada Kulonprogo akan diikuti dua pasangan, yakni pasangan Zuhadmono Azhari dan BRAY Iriani Pramastuti serta Hasto Wardoyo dan Sutedjo.



Harian Jogja/Desi Suryanto

Sejumlah pekerja mengusung kotak suara beserta perlengkapan pemungutan suara ke armada pengangkut di Gudang Logistik KPU

Kota Jogja, Jalan Imogiri Timur, Giwangan, Umbulharjo, Senin (13/2). Proses distribusi mendapat pengawasan ketat dari kepolisian.

**MEWASPADAI
KETIDAKBERESAN
DALAM
PEMUNGUTAN
SUARA**



Grafis: Harian Jogja/Wengki Irawan | Sumber: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005